

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, *good governance* menjadi landasan krusial bagi keberhasilan penyelenggaraan negara, baik pada skala nasional maupun daerah. *Good governance* memberikan kerangka kerja terstruktur untuk mengarahkan cara pemerintah mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat, tuntutan terhadap sistem pemerintahan yang responsif dan adaptif makin menguat, sehingga pemerintah perlu menginisiasi perubahan terarah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (Mampo & Megawati, 2024). Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat legitimasi lembaga negara dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas (Rahmawati et al., 2025).

Pada prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (2024), terdapat sembilan prinsip utama yang harus dijalankan, yaitu partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, kepedulian terhadap kepentingan, orientasi konsensus, kesetaraan, efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Prinsip-prinsip ini bertujuan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, bertanggung jawab, dan mampu



mencegah penyalahgunaan wewenang. Guna mewujudkannya, dibutuhkan komitmen bersama serta kolaborasi erat antar-*Stakeholder*, khususnya di tingkat kelurahan.

Dalam memahami penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara menyeluruh, penting untuk melihat bagaimana struktur pemerintahan di Indonesia bekerja dari tingkat pusat hingga kelurahan. Struktur pemerintahan terdiri dari beberapa tingkatan yang berkoordinasi secara vertikal. Pemerintah pusat berada pada posisi tertinggi yang membawahi pemerintah provinsi. Selanjutnya, pemerintah provinsi membawahi pemerintah Kabupaten/kota. Di bawah kabupaten/kota terdapat pemerintahan kecamatan, dan di tingkat paling bawah terdapat kelurahan sebagai kesatuan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan hierarki ini, Pemerintah Kota Kendari merancang inovasi “Kelurahan Presisi” sebagai langkah memperkuat tata kelola di level terendah dengan mengandalkan data kelurahan yang akurat untuk menyempurnakan kualitas pelayanan publik. Program ini mengutamakan pemanfaatan data valid untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan kualitas layanan, dan memantau kinerja kelurahan secara berkelanjutan. Inovasi ini bertujuan menjadikan data sebagai pijakan utama di setiap tahap pemerintahan mulai dari perancangan program, penentuan kebijakan, hingga penilaian

paratur. Pemerintah menunjukkan komitmen dalam kan sistem pelayanan yang terbuka, efisien, dan ligan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya



dalam hal akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan kepekaan terhadap kebutuhan warga (Kemenkumham Sultra, 2024).

Sebagai perwujudan inovasi di tingkat lokal, lurah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Tugas dan tanggung jawab lurah bersifat kompleks, mulai dari menjalankan roda pemerintahan, menjadi fasilitator pembangunan, mediator konflik, hingga penggerak pemberdayaan dan partisipatif masyarakat. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh lurah menjadi aspek krusial dalam memastikan pemerintahan kelurahan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Urgensi peran ini juga ditegaskan dalam berbagai pandangan yang menempatkan kelurahan sebagai garda terdepan dalam sistem pemerintahan

Menurut Fadli (dalam Lampasa & Ahmad, 2024) menyebutkan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga kinerja kelurahan sangat menentukan citra birokrasi. Lurah, sebagai pemimpin bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Agar dapat menjalankan peran tersebut secara optimal, kedudukan dan kewenangan lurah telah diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan.



ran strategis lurah tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang mengatur kedudukan dan fungsinya dalam sistem pemerintahan daerah. Landasan ini menjadi fondasi penting dalam membentuk

kepemimpinan lurah yang efektif dan akuntabel. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal (229) menyatakan bahwa kelurahan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan perangkat kecamatan serta bertanggung jawab kepada camat. Sementara itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal (2) dan (3) berfungsi sebagai dasar hukum dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan pemerintahan yang profesional serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurut Syarifuddin (dalam Sukadi et al., 2024) Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan. Lurah sebagai pemimpin harus memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan lurah dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengoordinasikan seluruh tugas tersebut menjadi faktor kunci keberhasilan. Dalam praktiknya terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh seorang lurah, seperti gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, transformasional dan *Laissez-faire* (bebas). Setiap gaya kepemimpinan memiliki dampak yang berbeda terhadap efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.



berhasilan gaya kepemimpinan ini tentunya sangat
dhi oleh kapasitas aparatur kelurahan sebagai
a teknis dalam birokrasi daerah. Aparat kelurahan
bagian dari pegawai negeri memiliki peran dalam

mendorong pembangunan, mengingat mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi di lapangan. Oleh karena itu, kualitas birokrasi suatu daerah sangat bergantung pada kualitas aparatur negara yang menjalankannya. Efektivitas kepemimpinan lurah tidak hanya berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga pada implementasi prinsip-prinsip *good governance* di tingkat kelurahan. Namun, dalam praktiknya, kepemimpinan lurah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain pengelolaan dana yang belum optimal, keterbatasan pemahaman perangkat kelurahan terhadap teknologi informasi, serta rendahnya disiplin aparatur.

Kecamatan Baruga dibentuk secara resmi melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2001, yang menetapkan batas wilayahnya sebagai bagian dari penataan pemerintahan daerah. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan kejelasan tugas dan tanggung jawab di tingkat kecamatan mendorong lahirnya Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 43 Tahun 2008. Regulasi tersebut memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab camat dalam menangani urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dua regulasi tersebut menjadi



penting dalam mendukung pelaksanaan program dan di Kecamatan Baruga, sekaligus mendorongnya praktik *good governance* yang lebih sistematis, n, dan sesuai dengan kebutuhan warga setempat.

Pada tahun 2023, tingkat keberhasilan SAKIP di Kecamatan Baruga mencapai 97 %, namun laporan yang disajikan masih dalam bentuk agregat sehingga tidak memerinci pencapaian tiap kelurahan. Padahal, karakteristik demografis dan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dapat memengaruhi efektivitas penerapan prinsip *good governance*. Sebagai gambaran, Kecamatan Baruga memiliki total penduduk sebesar 34.497 jiwa, yang tersebar di empat kelurahan utama: Baruga (14.203), Lepo-Lepo (6.483 jiwa), Watubangga (9.674 jiwa), dan Wundudopi (4.137 jiwa). lebih lanjut, di Kelurahan Lepo-Lepo, terdapat 6.483 warga yang terorganisir dalam delapan Rukun Warga (RW) dan dua puluh lima Rukun Tetangga (RT). Variasi beban administratif dan pola koordinasi publik semacam ini berpotensi menimbulkan perbedaan signifikan dalam proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring kinerja. Setiap kelurahan memiliki ciri khas demografis, kondisi geografis, dan struktur kelembagaan yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memengaruhi seberapa efektif prinsip-prinsip *good governance* dijalankan di tingkat lokal.

Berangkat dari kondisi tersebut, berbagai fenomena problematik juga teridentifikasi di lapangan. Di kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, ditemukan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai prosedur



nembuat warga belum memahami secara memadai langkah administrasi yang harus dilalui. Tanpa tertulis seperti brosur, papan pengumuman, platform sial maupun sesi sosialisasi rutin, masyarakat sering

merasa kebingungan terkait persyaratan dokumen, estimasi waktu penyelesaian, dan mekanisme pengajuan permohonan. Akibatnya, mereka sering datang berulang kali dengan berkas tidak lengkap atau bahkan membatalkan pengajuan permohonan. Selain memperlambat proses pelayanan, minimnya sosialisasi menimbulkan kesan birokrasi yang rumit dan membuat warga merasa terpinggirkan dalam setiap tahap layanan. Oleh karena itu, penyusunan materi informatif yang mudah diakses dan pelaksanaan sosialisasi berkala sangat diperlukan untuk mempercepat layanan, mengurangi kesalahan administrasi, dan membangun kepercayaan publik. Disiplin kerja yang masih rendah juga berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

Fenomena lain yang tampak di Kelurahan Lepo-lepo adalah keberadaan lurah yang sering tidak ada di tempat saat dibutuhkan kehadirannya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Kondisi ini berdampak pada sistem pelayanan di kelurahan yang menjadi kurang efektif dan memperlambat proses administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, lurah juga memiliki pemahaman terhadap perubahan lingkungan dan mampu merespons. Namun, tanpa didukung oleh kedisiplinan dan manajemen pemerintahan yang optimal, upaya dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, penting untuk meninjau



am gaya kepemimpinan lurah dalam implementasi *ernance* guna memastikan efektivitas pemerintahan di kelurahan. Perbedaan karakteristik sosial dan birokrasi nunjukkan bahwa hasil penelitian sebelumnya belum

dapat sepenuhnya mewakili kondisi yang ada di Kelurahan Lepo-lepo.

Berbagai gaya kepemimpinan lurah telah diteliti di daerah lain. Pada tahun 2018, Citra Mariana Sihombing melakukan penelitian berjudul "Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Lurah Bandar Selamat Di Desa Bandar Selamat Kecamatan Medan Wordung Kota Medan". Dalam penelitian tersebut, gaya kepemimpinan lurah dinilai berdasarkan empat indikator demokratisasi. Hasil analisis juga menyoroti efektivitas gaya demokratis birokratis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa lurah cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang demokratis meskipun ada tantangan partisipasi masyarakat dan masalah keamanan lingkungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fania Ilmi Chaeroni (2022) berjudul "Analisis Gaya Kepemimpinan Berua Lurah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Periode 2022" mengkaji penerapan gaya kepemimpinan *visioner* sesuai dengan empat dimensi Burt Nanus (penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pembina). Temuan tersebut menunjukkan dominasi peran penentu arah yang efektif dalam menetapkan visi dan misi kelurahan, serta fleksibilitas adaptasi gaya kepemimpinan lain untuk meningkatkan koordinasi internal dan kualitas pelayanan publik.



nelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ilan implementasi *good governance* sangat ng pada bagaimana lurah mengelola dan menerapkan pemimpinannya. Oleh karena itu, penerapan gaya

kepemimpinan yang baik dapat membantu lurah dalam memastikan bahwa prinsip *good governance* dapat terwujud dalam pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Studi sebelumnya memberikan wawasan yang berguna, tetapi juga meninggalkan celah. Sihombing (2018) menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan demokratis bekerja di Bandar Selamat, terutama tentang partisipasi bawahan dan pengambilan keputusan bersama, namun karena hanya satu studi kasus yang didasarkan pada data kualitatif, hasilnya sulit untuk digeneralisasikan dan pengaruh gaya terhadap capaian pelayanan belum diukur secara sistematis. Sementara Chaeroni (2023) mengemukakan kuatnya peran penentu arah pada Lurah Berua yang membantu meningkatkan administrasi dan pelayanan, namun kajian tersebut belum menjelaskan penyebabnya secara mendalam seperti peran anggaran, kapasitas organisasi, atau partisipasi warga dan minimnya data pendukung dari sumber lain sehingga berisiko bias. Kondisi di Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga berbeda dengan kedua lokasi tersebut dari segi demografi, struktur birokrasi, dan partisipasi warga, sehingga diperlukan kajian khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana Lurah Lepo-lepo menerapkan gaya kepemimpinan demokratis terhadap prinsip-prinsip *good governance* dan pencapaian pelayanan. Dengan



gunakan berbagai sumber data, diharapkan temuan menjadi lebih kuat, kontekstual, dan bermanfaat lasar rekomendasi kebijakan tingkat kelurahan.

Menyadari pentingnya peran kepemimpinan dalam suatu instansi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan demokratis lurah di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Penelitian ini berfokus dalam memahami bagaimana gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan dapat mempengaruhi pemerintahan kelurahan dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan serbagai berikut.

1. Bagaimana gaya kepemimpinan demokratis lurah di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dalam implementasi *good governance*?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan lurah di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari dalam penerapan prinsip *good governance*.

1.4 Manfaat

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.



Sebagai teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori kepemimpinan, khususnya dalam konteks pemerintahan kelurahan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang implementasi *good*

governance di tingkat lokal serta memberikan perspektif baru mengenai gaya kepemimpinan yang efektif dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada kepala dan aparat kelurahan dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas kepemimpinan aparatur kelurahan melalui program pembangunan berkelanjutan dan pelatihan aparatur, dalam rangka penguatan tata kelola kelurahan yang transparan, akuntabel, dan responsive

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 *Good Governance*

Menurut Saeli, Justawan & Jannah (2024), *Good governance* atau pemerintahan yang baik merujuk pada kondisi pemerintahan yang sehat, yaitu pemerintahan yang mampu menjalankan visi, misi, serta tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat rakyat. Istilah “good” dalam *good governance* mencerminkan dua dimensi utama. Pertama, menggambarkan nilai-nilai yang berpihak pada kehendak rakyat serta mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencapai tujuan



seperti kemandirian, Pembangunan berkelanjutan, dan sosial. Kedua, mencakup aspek fungsional pemerintahan yang dituntut untuk bekerja secara efektif dan

efisien dalam pelaksanaan tugas demi mewujudkan tujuan tersebut.

Menurut Koiman (dalam Mendrofa et al., 2024) *governance* adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kepentingan publik serta menegakkan hukum. Mekanisme ini memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, menyelesaikan konflik dan menjalankan hak serta kewajibannya. *Good governance* menekankan tata kelola bebas korupsi, berlandaskan hukum, serta menjamin hak asasi manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, Hasriani (2024) menjelaskan bahwa *good governance* adalah prinsip di mana kekuasaan pemerintahan sesungguhnya berada di tangan masyarakat, namun tetap dalam pengawasan dan regulasi pemerintah. Pelaksanaannya menuntut tata kelola yang efektif, efisien, transparansi, responsif, serta partisipasi aktif warga. Sejalan dengan itu, Nurhidayat (2023) menegaskan *good governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif dan bertanggung jawab, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar yakni partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, supremasi hukum, dan kesetaraan, demi menghasilkan proses dan capaian pemerintahan yang baik.

Sebagai upaya memperjelas dan melengkapi ran mengenai *good governance* yang telah kan oleh berbagai pihak sebelumnya, *United Nations rent Programme* (UNDP) merumuskan sembilan ama yang disusun secara sistematis. Prinsip-prinsip ini



tidak hanya menjadi pedoman teoritis, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi banyak negara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam buku birokrasi dan *good governance* (2024), sembilan prinsip ini yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat (*society participation*)

Setiap warga negara memiliki hak untuk berkontribusi dalam pengambilan Keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi ini harus didukung oleh kebebasan berpendapat dan akses informasi yang terbuka.

2. Supremasi Hukum

Pemerintah harus menjunjung tinggi hukum yang adil, tidak diskriminatif dan ditegakkan secara konsisten. Sistem hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

3. Transparansi (*Transparency*)

Pemerintah wajib menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik.

4. Peduli terhadap *Stakeholder* (*Responsifness to Stakeholder*)



rintah yang baik harus memperhatikan kebutuhan arakat dan dunia usaha, serta memastikan layanan diberikan secara adil dan tepat sasaran.

entasi Konsensus (*Consensus Oriented*)

Pegambilan Keputusan harus dilakukan melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan dan sumber daya publik. Pemerintah harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan maupun kebijakan yang dibuat.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pejabat publik bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka kepada masyarakat secara institusi yang berwenang. Mekanisme pengawasan harus diterapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pemimpin dan masyarakat harus memiliki pandangan jangka panjang yang mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan sejarah dalam membangun tata Kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Mendrofa et al, (2024) dalam buku *Good Governance Melalui Publik*



1. Terdapat beberapa prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut :

1. Transparansi

Salah satu prinsip utama tata kelola yang baik adalah transparansi, yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan akses informasi bagi publik. Transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah diketahui dan dipahami oleh publik, yang mengarah pada akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2. Akuntabilitas

Prinsip dasar akuntabilitas mengharuskan kepada lembaga publik dan pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap pilihan, tindakan, dan kebijakan yang mereka buat. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah memiliki prosedur yang transparan untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki kekurangan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

3. Partisipasi

Partisipasi merupakan prinsip *good governance* yang mengedepankan keterlibatan masyarakat agar aspirasi mereka terkomodasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tanggap dan sesuai kebutuhan.

4. Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan yang menguntungkan serta pelayanan yang cepat, akurat, dan memuaskan. Di sisi lain, efisiensi menekankan penggunaan terbaik dari sumber daya tersedia untuk mencapai hasil sebesar mungkin



dengan jumlah uang, waktu, dan usaha yang paling sedikit. Pelayanan publik dapat dikatakan efektif dan efisien jika mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran sekaligus menghindari pemborosan

5. Keadilan dan Inklusivitas

Keadilan dan inklusivitas merupakan prinsip yang memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil dan setara, tanpa ada pihak yang terabaikan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik., Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

1.5.2 Kepemimpinan

Menurut Fahmi, Puspanintyas, dan Widiyanto (2024), seorang pemimpin memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi karena mampu memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya tujuan bersama. Dalam menjalankan perannya secara efektif, pemimpin dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, baik dari sisi administrasi maupun strategi. Di samping itu, karakter yang kuat, kemampuan dalam memengaruhi serta mengarahkan bawahan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan komunikasi yang baik menjadi elemen penting dalam kepemimpinan. Pemimpin juga perlu mampu memberikan perlindungan, membangkitkan motivasi, serta



hubungan interpersonal yang harmonis dengan nya.

bih lanjut, Siagan (dalam Waedoloh, Purwanta & 2021) menyampaikan bahwa efektivitas

kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan pengambilan keputusan, tetapi juga dari keberhasilan pemimpin dalam menjalankan lima fungsi utama kepemimpinan. Fungsi – fungsi tersebut meliputi :

1. Menetapkan arah pencapaian tujuan organisasi;
2. Bertindak sebagai perwakilan dan juru bicara organisasi dalam berinteraksi dengan pihak luar;
3. Menjadi komunikator yang efektif;
4. Bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik internal; dan
5. Bertindak sebagai integrator yang rasional, objektif, dan netral.

Tinggogoy (2024) menyatakan bahwa pemimpin perlu menunjukkan sikap yang layak dijadikan teladan, terutama dalam meningkatkan disiplin dan kinerja para aparatur. Hal ini penting karena sikap dan tindakan seorang pimpinan sangat memengaruhi perilaku bawahannya. Jika dalam keseharian di lingkungan kelurahan seorang pimpinan tidak mampu memberikan contoh yang baik, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kedisiplinan dan kinerja staf yang dipimpinnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kosali (2022) menegaskan bahwa kepemimpinan sangat penting bagi seorang pemimpin



memberi contoh kepada pegawai melalui sikap dan perilaku sehingga mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis (Purba & Ahmad, 2024). Sementara itu, Marlis, Andri, & Ningsih (2025) menekankan bahwa kepemimpinan berperan

krusial dalam meningkatkan disiplin kerja organisasi. Pemimpin yang baik menjadi teladan dengan mematuhi peraturan, sehingga mendorong pegawai untuk disiplin. Selain itu, motivasi dari pemimpin membuat pegawai lebih bersemangat dalam menjalankan tugas mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lurah berperan sentral dalam membentuk kinerja aparatur dan menciptakan suasana kerja yang produktif di lingkungan kelurahan. Kepemimpinan yang efektif didukung oleh keteladanan, keterampilan manajerial, dan komunikasi yang baik merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola yang disiplin, responsif, dan akuntabel. Selain itu, peran kepala kelurahan juga penting dalam menjembatani kebijakan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

1.5.2.1 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan yang efektif juga berkontribusi besar dalam implementasi *good governance* di tingkat kelurahan, di mana lurah yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik dapat meningkatkan kinerja aparatur serta memberikan pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas kepada masyarakat.



Menurut Salsabila et. al (2022) Gaya kepemimpinan hakikatnya mencerminkan pola tingkah laku seorang pemimpin yang mencakup kemampuan dan caranya dalam memimpin. Pola ini terwujud dalam bentuk-bentuk tertentu

yang secara aktif melibatkan proses memengaruhi. Melalui gaya kepemimpinan, terjalin kerja sama serta kesamaan visi dan misi di antara anggota organisasi, sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Secara operasional, gaya kepemimpinan diartikan sebagai serangkaian perilaku yang dirancang untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan kepentingan individu demi mencapai sasaran tertentu.

Selain itu, menurut Tinggogoy (2024) Gaya kepemimpinan mencerminkan realitas dalam sebuah organisasi di mana peran pemimpin sangat krusial dan dapat menjadi penentu utama keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin baik secara individu maupun kelompok tidak dapat menjalankan tugasnya sendirian. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemimpin memerlukan dukungan dari sekelompok anggota (bawahan) yang membantu mewujudkan berbagai tugas dan tanggung jawabnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kosali (2022) menegaskan bahwa kepemimpinan memegang peran penting dalam membentuk suasana kerja yang kondusif, salah satunya melalui keteladanan sikap dan tindakan yang ditunjukkan kepada pegawai (Lampasa & Ahmad, 2024). Sementara itu, Marlis, Andri, dan Muharram (2025) menekankan bahwa kepemimpinan berperan signifikan

meningkatkan disiplin kerja organisasi. Pemimpin taat terhadap aturan akan menjadi panutan bagi pegawai, sehingga mendorong terciptanya kedisiplinan dan tingkat kerja yang lebih tinggi.



Dalam praktiknya terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh seorang lurah, seperti gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, birokrasi, karismatik, transformasional, *Laissez-faire* (bebas), transaksional, moralis, dan militeristik. Setiap gaya kepemimpinan memiliki dampak yang berbeda terhadap efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Fahmin, Jamizal, & Us (2024) pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat sangat menentukan efektivitas pengelolaan organisasi serta pencapaian tujuan yang diinginkan, berikut beberapa gaya kepemimpinan.

1) Gaya Kepemimpinan Demokratis

Pemimpin dengan gaya ini memberikan ruang yang luas bagi bawahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dengan gaya ini menghargai pendapat anggota tim, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses kerja. Pemimpin demokratis juga cenderung transparan dalam memberikan informasi terkait tugas dan tanggung jawab, menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan partisipatif.

2) Gaya Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan ini bersifat sentralistik, di mana semua keputusan berada di tangan pemimpin tanpa banyak melibatkan bawahan. Pemimpin otoriter menetapkan aturan yang harus diikuti secara ketat dan mengharapkan kepatuhan penuh dari anggota tim. Ciri utamanya adalah kejelasan arah dan efisiensi



dalam pencapaian target, namun kelemahannya terletak pada minimnya fleksibilitas serta potensi kurangnya inovasi dari bawahan.

3) Gaya Kepemimpinan birokrasi

Gaya ini berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemimpin birokratis sangat mengendalkan regulasi yang ada dalam menjalankan organisasi, sehingga sering kali kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Gaya ini efektif dalam lingkungan yang membutuhkan keteraturan dan standar kerja yang ketat.

4) Gaya Kepemimpinan Karismatik

Pemimpin dengan gaya ini memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menginspirasi serta memotivasi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin dengan gaya ini sering kali memiliki visi yang besar serta kemampuan komunikasi yang baik, sehingga dapat membangun loyalitas tinggi dalam tim. Namun, kepemimpinan ini bisa kurang efektif jika hanya mengandalkan pesona tanpa tindakan yang konkrit dan konsisten.

5) Gaya Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan ini menekankan perubahan dan inovasi. Pemimpin transformasional mengarahkan organisasi menuju perkembangan yang lebih baik dengan mendorong kreativitas, motivasi tinggi, dan komitmen terhadap tujuan jangka panjang. Pemimpin ini berperan dalam meningkatkan potensi bawahan serta menciptakan lingkungan kerja yang dinamis.



6) Gaya *Laissez-Faire*

Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri. gaya ini hanya efektif jika anggota tim memiliki inisiatif tinggi serta mampu bekerja secara mandiri. Namun, jika bawahan kurang merasa memiliki tanggung jawab, gaya ini dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan arah yang jelas.

7) Gaya Kepemimpinan Transaksional

Berorientasi pada sistem imbalan dan hukuman sebagai alat motivasi. Pemimpin transaksional menetapkan target dan mengharapkan kepatuhan dari bawahan, di mana kinerja mereka akan dinilai berdasarkan pencapaian yang terukur. Gaya ini cocok untuk organisasi yang fokus pada hasil konkrit dan tugas jangka pendek.

8) Gaya Kepemimpinan Moral

Gaya kepemimpinan ini berlandaskan pada nilai-nilai etika dan empati. Pemimpin moral menghargai hubungan yang harmonis, menunjukkan sikap peduli terhadap bawahannya, dan selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan kebaikan.

9) Gaya Kepemimpinan Militeristik



Kepemimpinan ini mirip dengan kepemimpinan otoriter, gaya ini mengalkan sistem komando yang tegas dan kedisiplinan yang tinggi. Pemimpin dengan gaya ini sangat menekankan kepatuhan, hierarki yang ketat,

serta ketegasan dalam mengambil Keputusan. Keunggulannya adalah stabilitas dan ketertiban, tetapi bisa memberikan atau menimbulkan tekanan yang berlebihan bagi bawahan.

Selain itu, Menurut Kurt Lewin, Ronald Lippitt, dan Ralph K. White (1939), pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya dapat dikelompokkan menjadi tiga gaya utama: otokratis, demokratis, dan *laissez-faire*. Ketiga gaya ini membentuk kerangka konseptual yang penting dalam memahami dinamika kepemimpinan dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi (Fuady & Latifah, 2020).

1) Gaya Otokratis

Gaya otokratis dicirikan oleh pengambilan keputusan yang tersentralisasi, di mana semua kebijakan dan strategi ditetapkan sendiri-sendiri oleh pemimpin tanpa melibatkan diskusi atau konsultasi dengan anggota kelompok. Pelaksanaan tugas mengikuti arahan atasan satu arah, sehingga fleksibilitas dan daya tanggap terhadap kebutuhan bawahan terbatas. Selain itu, cenderung ada hambatan dalam saluran umpan balik-pemimpin memberikan instruksi secara impulsif dan hanya ada sedikit ruang untuk inisiatif anggota yang pada akhirnya dapat mengurangi motivasi dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama.

2) Gaya Demokratis

Dalam gaya demokrasi, para pemimpin mendorong partisipasi kolektif dalam proses pengambilan keputusan dan menjadikan kebijakan sebagai objek diskusi terbuka



antar anggota. Dalam perannya sebagai fasilitator, pemimpin memberikan saran teknis, memoderasi dialog, dan memastikan bahwa setiap individu dapat menyampaikan gagasan dan kritik secara objektif. Proses ini menumbuhkan rasa saling percaya, tanggung jawab bersama, dan komitmen kolektif terhadap tujuan organisasi, sehingga produktivitas dan kepuasan kerja cenderung meningkat.

3) Gaya *Laissez-Faire*

Gaya *Laissez-faire* menempatkan otonomi penuh pada anggota kelompok untuk merancang dan melaksanakan kegiatan tanpa campur tangan langsung dari pemimpi. Pemimpin memainkan peran minimal, hanya menyediakan sumber daya dan bahan pendukung, sementara koordinasi dan kontrol formal hampir tidak ada. Meskipun pendekatan ini dapat meningkatkan kreativitas dan inisiatif individu, ketiadaan mekanisme bimbingan dan pengendalian seringkali mengakibatkan inkonsistensi kinerja dan standar kualitas kerja yang lebih rendah.

Gaya kepemimpinan yang efektif juga berkontribusi besar dalam implementasi *good governance* di tingkat kelurahan, di mana lurah yang mampu mengelola pemeritahan dengan baik dapat meningkatkan kinerja aparatur serta memberikan pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas

asyarakat.



1.5.2.2 Indikator Gaya Kepemimpinan Demokratis

Handrian & Iwari (2022) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis melibatkan anggota atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun komitmen kerja dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai elemen utama dalam setiap kelompok atau organisasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sutikno (2014) yang menekankan bahwa pemimpin bergaya demokrasi ditandai dengan sikap yang aktif, dinamis, dan memiliki arah yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin seperti itu mengelola kegiatan secara tertib dan bertanggung jawab. Selain itu, pembagian tugas disertai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur, sehingga memungkinkan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam proses organisasi (Kurniati et al., 2023). Lebih lanjut, Robbins (2003: 168, dikutip dalam Garis, Garvera, & Sihabudin, 2021) memaparkan ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis sebagai berikut :

1. Kebijakan dikembangkan melalui diskusi kelompok, di mana para pemimpin memberikan dorongan dan dukungan dalam proses pengambilan Keputusan.
2. Setiap kegiatan didiskusikan secara terbuka, artinya pemimpin menetapkan langkah-langkah umum untuk mencapai tujuan, sambil menawarkan alternatif prosedur teknis bila diperlukan.



3. Anggota diberi kebebasan untuk memilih rekan kerja dan pembagian tugas ditentukan secara kolektif oleh kelompok.
4. Pemimpin berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan bawahan untuk pencapaian tujuan organisasi.
5. Gaya kepemimpinan ini menyeimbangkan fokus antara tugas dan kebutuhan bawahan, sehingga keduanya mendapatkan porsi yang seimbang.

Dalam gaya kepemimpinan demokratis, terdapat empat dimensi utama yang digunakan sebagai indikator, yaitu: pendelegasian tanggung jawab, keaktifan, pengambilan keputusan secara kolektif, serta empati terhadap anggota. Dimensi ini merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, Ronald Lippitt, dan Ralph K. White, sebagaimana dikutip oleh Maryanto dan Ismu (2010), dan dijelaskan kembali oleh Andani et al., (2024).

1. Pendelegasian tanggung jawab berarti pemimpin memiliki kemampuan untuk menitipkan tugas atau tanggung jawab kepada anggotanya. Dalam praktiknya, seorang pemimpin tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaannya sendiri. Oleh karena itu, perlu mendelegasikan kewenangan kepada anggota tentunya dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian masing-masing orang. Penting bagi pemimpin untuk menyesuaikan jenis tugas dengan kompetensi anggota agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.



2. Keaktifan menggambarkan sejauh mana pemimpin mampu menjalin ss dan interaksi yang baik dengan seluruh anggota organisasi. Gaya kepemimpinan demokratis bukanlah satu arah-pemimpin mengandalkan partisipasi aktif anggotanya, seperti menyampaikan gagasan atau saran. Lingkungan kerja yang demokratis memberi setiap orang ruang untuk tumbuh dan berkontribusi.
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama atau kolektif. Artinya, keputusan tidak hanya datang dari pemimpin saja, tetapi juga mempertimbangkan pendapat semua anggota. Proses ini biasanya dilakukan melalui diskusi terbuka antara dua orang atau lebih sehingga hasil keputusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Empati adalah kemampuan pemimpin untuk memahami dan merasakan kondisi anggota, baik dari segi perasaan, minat, maupun masalah yang sedang dihadapi. Seorang pemimpin yang empatik peka terhadap masalah anggotanya dan mampu memberikan tanggapan yang tepat. Empati juga mencerminkan sikap saling peduli, saling membantu, dan menghormati orang lain di lingkungan kerja.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

kaitan Gaya Kepemimpinan Demokratis dan ip *Good Governance*

aya kepemimpinan demokratis gaya kepemimpinan
ratis umumnya dijelaskan melalui indikator

pendelegasian tanggung jawab, keaktifan komunikasi, pengambilan keputusan bersama, dan empati. Indikator-indikator tersebut secara konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance*, terutama partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan sebagaimana dirumuskan oleh UNDP.

Indikator pendelegasian tanggung jawab mencerminkan sejauh mana Lurah memberikan kewenangan kepada aparatur kelurahan serta melibatkan RT/RW sebagai perpanjangan tangan pemerintahan di tingkat lingkungan. Praktik pendelegasian ini berkaitan langsung dengan prinsip akuntabilitas, karena pembagian tugas dan kewenangan yang jelas memungkinkan adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, keaktifan komunikasi antara Lurah, aparatur kelurahan, RT/RW, dan warga berkontribusi dalam mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat. Komunikasi dua arah yang terbuka tidak hanya mempermudah penyampaian informasi kebijakan dan kegiatan, tetapi juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta keluhan, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih inklusif.



Indikator pengambilan keputusan bersama menunjukkan keterlibatan aparatur dan masyarakat, khususnya RT/RW, dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan di tingkat kelurahan. Praktik ini sejalan dengan

prinsip partisipasi masyarakat dalam *good governance*, di mana keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang mempertimbangkan berbagai kepentingan warga.

Sementara itu, indikator empati tercermin dalam kemampuan Lurah memahami kebutuhan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi RT dan warga. Sikap empatik ini berkaitan erat dengan prinsip kepedulian terhadap pemangku kepentingan, karena mendorong lahirnya kebijakan dan tindakan yang responsif serta berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.

Dengan demikian, secara teoretis gaya kepemimpinan demokratis memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat pemerintahan. Setiap indikator kepemimpinan demokratis, meliputi pendelegasian tanggung jawab, keaktifan komunikasi, pengambilan keputusan bersama, dan empati, secara konseptual berkaitan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan peduli terhadap pemangku kepentingan.

1.5.3 Peran Lurah dalam Mewujudkan *Good Governance*

Kelurahan merupakan satuan wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan dalam struktur pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, Kelurahan menjadi wilayah kerja lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditunjuk oleh Bupati atau Wali



Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal (Rantepasang, Kaawoan, & Rengkung, 2017).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, kelurahan dipimpin oleh seorang lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau kota yang berada di bawah kecamatan. Lurah berperan sebagai pejabat administratif yang mengemban tugas dalam menjalankan roda pemerintahan kelurahan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari perangkat daerah, kelurahan memiliki kewenangan terbatas dibandingkan kelurahan dalam hal pengaturan wilayahnya. Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan oleh camat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 Pasal 25.

Adapun tugas lurah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) mencakup:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat,
4. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, serta
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



lam melaksanakan tugas dan tanggung jawab lurah beserta seluruh perangkat kelurahan wajib nggarakan pelayanan publik secara adil dan tidak

memihak pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, pegawai kelurahan diharapkan menunjukkan tekad, semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan masyarakat, sehingga penyelenggaraan layanan dapat berlangsung optimal dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Rezky, Basalamah & Rahayu, 2025)

Kepala kelurahan memegang peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat kerja yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Ismail, Yahya & Alwi, 2025). Sebagai pemimpin di tingkat kelurahan, lurah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tujuh fungsi utama yang menjadi bagian dari tugasnya, sesuai dengan otoritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepemimpinan lurah yang efektif dan mampu beradaptasi menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Berdasarkan peran strategis lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kelurahan, dapat disimpulkan bahwa lurah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Selain memastikan efektivitas roda pemerintahan, lurah secara langsung mengimplementasikan daerah kepada masyarakat. Dalam praktiknya, tugas meliputi pengelolaan administrasi, pemberdayaan warga,



pemberian pelayanan publik yang adil, serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan lurah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis yang terarah serta kemampuan kepemimpinan lurah dalam mengoordinasikan perangkat kelurahan dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam setiap proses pemerintahan. Penerapan prinsip prinsip *good governance* ini pada gilirannya memungkinkan terciptanya pemerintahan kelurahan yang bersih, profesional, dan demokratis, di mana partisipasi aktif warga memperkuat rasa memiliki dan keterbukaan informasi serta penegakan hukum yang adil menumbuhkan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, peran lurah sebagai pemimpin lokal menjadi sangat krusial, tidak hanya dalam menyediakan layanan publik berkualitas, tetapi juga dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan agar mampu memberdayakan masyarakat, membangun konsensus, serta merancang program inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan kelurahan memenuhi kebutuhan warga secara efektif dan menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan



1.6 Kerangka Konseptual

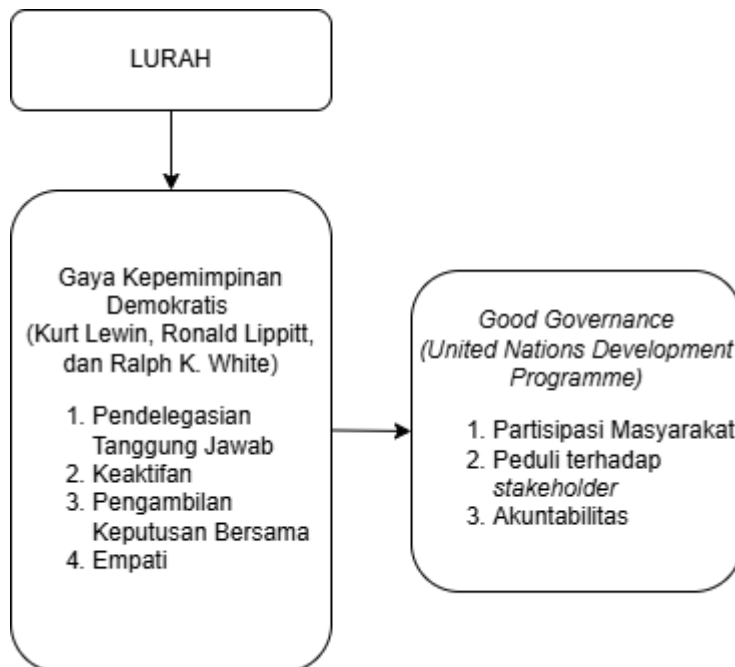
Kerangka konsep ini dirancang untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana gaya kepemimpinan demokratis Lurah memengaruhi penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Lepo-Lepo, dengan fokus pada tiga aspek utama: partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan (difokuskan pada RT dan warga). Gaya kepemimpinan demokratis dioperasionalkan melalui indikator-indikator internal, seperti pendelegasian wewenang kepada perangkat kelurahan, praktik komunikasi dua-arah antara pimpinan, aparatur, dan RT, serta mekanisme keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebagai tolok ukur keberhasilan, penerapan *good governance* diukur melalui: (1) tingkat dan mekanisme partisipasi RT dan warga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan; (2) bentuk akuntabilitas aparatur kelurahan yang meliputi keterbukaan informasi, prosedur pertanggungjawaban, dan konsistensi pelayanan; serta (3) bukti kepedulian terhadap RT dan warga yang tercermin dalam kebijakan responsif dan tindak lanjut atas keluhan/aspirasi masyarakat.

Pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang menelaah bukti empiris lapangan untuk menggambarkan praktik-praktik kepemimpinan dan tata kelola dalam kondisi alaminya. Data lapangan meliputi kutipan wawancara



dan dengan Lurah, perangkat kelurahan, pengurus RT, warga, observasi aktivitas musyawarah dan pelayanan, dokumentasi terkait. Data tersebut diorganisir menjadi data deskriptif yang merekam mekanisme komunikasi,

pola pendelegasian, proses partisipasi, dan bentuk pertanggungjawaban aparatur. Berdasarkan penyajian data deskriptif ini, penelitian akan menunjukkan secara empiris apakah praktik kepemimpinan demokratis tampak mendukung, kurang mendukung, atau tidak berdampak pada realisasi partisipasi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap RT dan warga, dan temuan-temuan tersebut menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas tata kelola di tingkat kelurahan.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelurahan Lepo-lepo dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah administrasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga memiliki peran strategis dalam pengelolaan kegiatan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kelurahan yang berada di Kota Kendari ini dikelilingi oleh masyarakat yang heterogen, yang menambah nilai strategis dalam konteks penelitian ini. Penelitian ini juga berfokus pada isu-isu yang terdapat di kelurahan Lepo-lepo, khususnya terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan *good governance*. Temuan awal menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang perlu dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini rencananya akan berlangsung selama dua bulan, mulai September hingga November 2025.

2.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks dalam konteks tata kelola, seperti gaya kepemimpinan demokratis dan prinsip *good governance*, sekaligus menafsirkan kausal dan makna di balik temuan lapangan.



Penelitian ini menerapkan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan fenomena sosial dalam kondisi alaminya tanpa melakukan intervensi apa pun, dengan penekanan pada karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar-aktivitas (Sukmadinata dalam Amelia & Mardiana, 2019). Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang langsung berinteraksi dengan partisipan, sehingga data yang diperoleh berupa narasi, pengalaman, dan visualisasi. Alih-alih memulai dengan hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya, asumsi dan pemahaman penelitian justru tumbuh secara dinamis sepanjang proses pengumpulan dan analisis data, baik secara induktif maupun deduktif, berdasarkan pola dan tema yang muncul. Validitas penelitian dijaga melalui kredibilitas peneliti, keandalan sumber data, dan triangulasi. Partisipan dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi informasi yang mereka miliki. Data dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi wawancara, observasi, dokumen, dan materi audiovisual, kemudian dikode dan diorganisir menjadi tema-tema yang saling terkait guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena (Rasyid, 2022).

Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling relevan untuk mengkaji pola kepemimpinan lurah di Kelurahan Lepo-lepo dan memahami bagaimana gaya kepemimpinan demokratis dan penerapan prinsip *good governance* di

1 Lepo-lepo melalui interaksi langsung dengan di lapangan.



2.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan informan kunci. Sumber data primer mencakup wawancara mendalam dengan lurah Kelurahan Lepo-lepo, aparat kelurahan, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh adat, dan tokoh pemuda. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif di kantor kelurahan dan Lokasi- lokasi pelayanan publik lainnya guna mencatat secara langsung perilaku, pola interaksi, serta dinamika antara lurah, staf kelurahan, dan masyarakat dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Data primer ini bersifat kualitatif, berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan dari observasi, serta dokumen administratif seperti notulen rapat, rencana kerja kelurahan, dan laporan kegiatan yang diperoleh langsung melalui komunikasi dengan pihak kelurahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen dan literatur yang telah tersedia sebelumnya. Sumber tersebut meliputi bahan pustaka seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *good governance* dan gaya pimpinan demokratis. Selain itu, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan atau peraturan pelaksana lainnya. Dokumen



publikasi dari pemerintah kota, data demografi masyarakat Kelurahan Lepo-lepo, serta laporan dari media massa lokal tentang isu-isu yang berkembang di kelurahan juga dijadikan bahan acuan. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoretis dan kontekstual dalam penelitian, sekaligus memperkuat validitas data primer melalui teknik triangulasi.

2.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan demokratis yang dijalankan oleh Lurah Kelurahan Lepo-lepo memengaruhi penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang diprioritaskan dalam penelitian ini, yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan (dalam hal ini difokuskan pada RT dan warga).

Gaya kepemimpinan demokratis dioperasionalkan melalui indikator-indikator internal seperti pendelegasian wewenang kepada perangkat kelurahan, praktik komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf/RT, dan mekanisme keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, penerapan *good governance* diukur dari: (1) tingkat dan mekanisme partisipasi RT dan warga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan; (2) bentuk akuntabilitas aparat kelurahan dalam bentuk keterbukaan informasi, prosedur pertanggungjawaban, dan si pelayanan; serta (3) bukti kepedulian terhadap RT ga dalam kebijakan responsif dan tindak lanjut ispirasi.



Pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yang menelaah bukti empiris lapangan, termasuk kutipan wawancara dari Lurah, perangkat kelurahan, pengurus RT, dan warga untuk menentukan apakah praktik kepemimpinan demokratis nyata-nyata mendukung, kurang mendukung, atau tidak berdampak pada realisasi ketiga prinsip *good governance* tersebut. Analisis akan menempatkan kutipan-kutipan sebagai bukti kualitatif utama untuk menilai hubungan kausal dan kesesuaian antara praktik kepemimpinan dan capaian tata kelola di tingkat kelurahan. Temuan diharapkan menghasilkan gambaran yang jelas tentang peran kepemimpinan demokratis dalam mewujudkan *good governance* serta rekomendasi praktis yang relevan untuk memperkuat partisipasi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap RT dan warga di Kelurahan Lepo-lepo.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data bertujuan untuk menangkap makna, perilaku, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara mendalam dan holistik. Peneliti akan menghimpun informasi dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya, guna mendukung validitas dan kelengkapan data dalam menganalisis hubungan antara gaya kepemimpinan



is dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan
di Kelurahan Lepo-lepo.
servasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang sedang dijadikan sumber data. Metode observasi partisipatif memungkinkan data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, tajam, dan mampu menggali makna dari setiap perilaku nyata (Sulistiyo, 2019). Observasi partisipatif merupakan metode yang digunakan untuk mengamati secara langsung berbagai kegiatan dan interaksi yang terjadi di lingkungan kelurahan. Melalui keterlibatan aktif ini, peneliti secara sistematis mencatat pola perilaku aparat kelurahan, keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, serta dinamika pelayanan publik yang berlangsung sehari-hari. Pengamatan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan alam sebagaimana adanya tanpa campur tangan peneliti untuk menangkap gambaran otentik tentang praktik pemerintahan yang terjadi.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai upaya menggali data lebih dalam dari informan kunci. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka yang telah disusun berdasarkan topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi tentang persepsi, pandangan, dan pengalaman langsung informan terkait gaya kepemimpinan lurah dan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Subyek wawancara meliputi lurah Lepo-
to, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga



yang aktif dalam kegiatan musyawarah atau pelayanan publik. Wawancaranya fleksibel, terbuka untuk mengeksplorasi isu-isu yang berkembang selama percakapan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai arsip, Laporan Kegiatan Lurah, notulensi rapat, dokumen perencanaan, serta produk hukum dan Kebijakan yang berlaku di tingkat kelurahan. Selain dokumen resmi, bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan berita media lokal yang relevan juga diulas untuk memperkaya pemahaman konteks penelitian

2.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, analisis data tidak hanya mengumpulkan dan menyusun informasi, tetapi juga menafsirkan makna di balik setiap bagian data untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Menurut Miles & Huberman, 1994 (dalam Fadli, 2021) mengemukakan model interaktif di mana analisis data dijalankan sebagai serangkaian aktivitas yang saling terkait dan berulang. Model ini mencakup empat tahap utama seperti



ulan data, reduksi data, penyajian data, dan an/verifikasi-yang bersama-sama memastikan proses ra sistematis dan fleksibel, memungkinkan peneliti rus memeriksa, memperkaya, dan memvalidasi

temuannya selama penelitian. Berikut penjelasan terkait keempat teknik analisis data tersebut.

1 Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti berupaya mengumpulkan informasi naturalistik sebanyak-banyaknya melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi tertulis, dan catatan reflektif. Setiap dialog dengan lurah dan interaksi di kantor kelurahan direkam baik secara tertulis maupun audio visual untuk menangkap konteks, nuansa bahasa, dan isyarat nonverbal. Rekaman reflektif memungkinkan peneliti untuk menuliskan kesan awal, pertanyaan lanjutan, atau hipotesis spontan yang muncul selama pengumpulan data, sehingga tidak ada detail penting yang terlewatkan.

2 Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan penyaringan, pengelompokan, dan penataan ulang data mentah sehingga menjadi lebih fokus dan kaya makna. Pada fase ini, peneliti hanya memilih informasi yang relevan, merangkum temuan dalam narasi singkat, dan kemudian mengelompokkan potongan-potongan data tersebut ke dalam kategori atau tema yang selaras dengan tujuan penelitian. Pengurangan data bertujuan untuk membantu peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang muncul dari fenomena yang

Karena data mengalir terus menerus dari tahap mpulan hingga akhir penelitian, pengurangan kan secara berkelanjutan-tidak hanya menghilangkan



unsur-unsur yang kurang penting, tetapi juga mengklarifikasi temuan secara sistematis dan logis.

3 Penyajian data

Data yang diperkecil kemudian disajikan dalam format yang mendukung analisis mendalam. Peneliti menyusun narasi tematik, membuat tabel perbandingan antar kategori, atau menyusun matriks silang yang menunjukkan keterkaitan antara gaya kepemimpinan dan indikator *good governance*. Visualisasi ini baik dalam bentuk diagram alur atau diagram konsep yang bertujuan untuk memudahkan peneliti mengenali pola, kontradiksi, atau keterkaitan penting di antara berbagai temuan, sehingga narasi penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga terstruktur secara logis.

4 Kesimpulan dan verifikasi

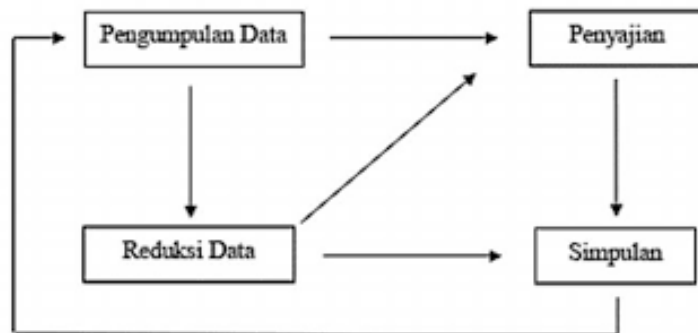
Pada tahap akhir, peneliti menyusun kesimpulan awal berdasarkan pola dan hubungan yang muncul dari penyajian data. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi melalui triangulasi-membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumen-serta pengecekan anggota dengan informan kunci untuk memastikan keakuratan interpretasi. Proses verifikasi berlangsung secara iteratif hingga temuan-temuan tersebut dianggap valid dan mampu menjawab rumusan permasalahan: bagaimana gaya kepemimpinan demokratis lurah di Kelurahan Lepo-lepo



Optimized using
trial version
www.balesio.com

tribusi terhadap penerapan prinsip *good governance*.
dengan penyajian keempat teknik analisis data naratif
ut, penelitian kualitatif deskriptif menjadi dinamis
1 terstruktur, sehingga setiap langkah saling

mendukung dan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan



Gambar 1.2 Bagan Metode Analisis Data

Sumber: Achmad Dandy (2021)



Optimized using
trial version
www.balesio.com